

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian. Melalui UU. No. 7 / 2004 tentang sumberdaya air dan PP No 20 / 2006 tentang irigasi diamanatkan bahwa pengelola system irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan. Adapun pengelolaan di maksud dilaksanakan oleh kelembagaan yang meliputi instansi, pemerintah, HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) dan Komisi Irigasi. Adapun kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) pada jaringan irigasi di tingkat primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Pengairan sesuai dengan kewenangan yang telah diamanatkan dalam undang-undang maupun peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.

Daerah irigasi yang bertempat di Kabupaten Pasuruan namun berada di bawah naungan langsung Provinsi Jawa Timur berjumlah 13 daerah irigasi, di mana 1 daerah irigasi merupakan daerah irigasi lintas Kabupaten Malang dan Pasuruan, 4 daerah irigasi merupakan daerah irigasi lintas Kabupaten Pasuruan / Kota Pasuruan dan 8 daerah irigasi yang terletak di Kabupaten / Kota Pasuruan. Hal tersebut sesuai dengan dasar hukum dalam pengelolaan irigasi yang berpedoman pada UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA, PP No. 20 Tahun 2006 tentang irigasi, Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2009 tentang irigasi, dan Perjanjian kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Pengairan provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pengairan Kabupaten / Kota (MOU).

Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan irigasi adalah melaksanakan pengembangan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas Kabupaten /

Kota dengan luasan kurang dari 3.000 ha, melaksanakan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha, serta menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan system irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha dan pada daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten / Kota dengan luasan kurang dari 3.000 ha. Salah satu daerah irigasi yang menjadi wewenang provinsi Jawa Timur adalah Daerah Irigasi (DI) Pateguan yang terletak di Kecamatan Pandaan. Daerah irigasi Pateguan memiliki luas areal 1.466 ha dengan saluran sepanjang 20.835 m.

Namun pada kenyataannya luas areal dan panjang saluran yang dimiliki daerah irigasi Pateguan masih belum cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan irigasi untuk lahan pertanian yang ada di wilayah tersebut. Kondisi yang ada di saluran irigasi daerah irigasi Pateguan banyak terjadi kerusakan seperti adanya kebocoran dan pendangkalan di sepanjang saluran irigasi. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya sedimen yang terdapat di saluran irigasi yang membuat aliran air menjadi terhambat. Terhambatnya aliran air yang ada di saluran irigasi memberikan dampak yang cukup signifikan kepada pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang ada di lahan pertanian. Tidak jarang hal tersebut juga menimbulkan konflik antara petani pemakai air dan juga petugas yang ada di lapangan. Sebagai contoh pada saat musim kemarau akan terjadiperebutan air yang digunakan untuk dialirkan kelahan pertanian, sehingga petugas harus bekerja lebih keras lagi untuk memberikan pelayanan kepada petani pemakai air. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kerusakan yang ada di saluranirigasi, diantaranya bias disebabkan minimnya anggaran sebagai dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, serta minimnya petugas yang ada di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi fisik dan personil eksisting pada Daerah Irigasi Pateguan?
2. Bagaimana angkakebutuhannyaoperasi dan pemeliharaan pada Daerah Irigasi Pateguan?

1.3 Batasan Masalah

Berikut ini adalah batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini tidak menilai seluruh daerah irigasi yang ada di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, namun hanya melakukan penelitian terhadap 1 (satu) daerah irigasi, yaitu DI. Pateguan yang berada di kecamatan Pandaan kabupaten pasuruan.
2. Acuan penilaian kondisi jaringan irigasi mengacu Per Men PUPR nomor 12 Tahun 2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
3. Perhitungan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan irigasi
4. Inventarisasi semua bangunan dan menelusuri semua bangunan fisik mulai dari hulu sampaihilir
5. Penelitian ini hanya membahas tentang perencanaan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta menelusuri permasalahan non teknis yang terjadi dilapangan menurut sudut pandang petani pemakai air.

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian menurut sudut pandang peneliti ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Daerah Irigasi Pateguan.

2. Untuk mengetahui angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan tambahan pengetahuan dalam melakukan penilaian kondisi jaringan irigasi dan angka kebutuhan nyata pengolahan irigasi yang bertujuan untuk merencanakan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi daerah irigasi sehingga dapat meningkatkan Kembali fungsi dan manfaatnya.
2. Memberikan masukan kepada stake holder dalam melakukan satuan biaya operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi yang dikelola oleh Dinas PU SDA Kabupaten Pasuruan.